

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh implementasi *e-government* (pesduk) terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Padang Pariaman diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan inti dari hasil dalam penelitian ini berdasarkan data yang di peroleh dan dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi *e-government* (Pesan Singkat Penduduk) di Kabupaten Padang Pariaman

Implementasi *e-government* pesduk di Kabupaten Padang Pariaman memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun dalam belum dapat diketahui sepenuhnya oleh banyak pihak yaitu masyarakat dan internal pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dibuktikan dengan masyarakat yang minim memberikan pesan melalui pesduk dan juga pemerintah yang kurang memberikan respon positif.

Dalam melaksanakan *e-government* tentu memerlukan bantuan alat yang mendukung pelaksanaan *e-government* pesduk, tetapi di Kabupaten Padang Pariaman kurang memiliki peralatan yang memadai. Pesduk merupakan layanan 24 jam dari perintah untuk masyarakat, namun server pesduk masih di Kota Cimahi dan pemerintah masih lambat dalam pencairan dana untuk pelaksanaan *e-government* pesduk tersebut. SDM sebagai pengelola dan pelaksanapun masih

kurang dan terbagi dari berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Koordinasi dalam pelaksanaan *e-government* pesduk ini memerlukan keseriusan yang besar dari pemerintah. Pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat dalam bentuk respon dan tindakan terhadap pertanyaan, keluhan, laporan atau saran dari masyarakat. Selanjutnya koordinasi antar pemerintah dilakukan berdasarkan keterangan wawancara satu kali sebulan, namun tidak terlaksana dengan sempurna dan efektif sampai saat ini.

Pesduk memerikan keamanan dalam bentuk perlindungan privasi bagi penggunanya karena nomor masyarakat yang mengirim pesan melalui pesduk tidak akan diperlihatkan pada web pesduk di situs pesduk.padangpariamankab.go.id. Pesduk merupakan layanan yang mudah karena pesduk tidak memerlukan data-data berupa dokumen atau file dari masyarakat untuk menggunakannya. Sehingga ini cukup mendukung untuk dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan dapat disimpulkan kondisi sosial, ekonomi dan politik pun dapat mendukung pelaksanaan *e-government* pesduk ini.

Pemahaman pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu diperhatikan pada internal pemerintahan karena selama ini dalam pelaksanaan pesduk masih minim respon yang positif terhadap pertanyaan yang masyarakat berikan melalui pesduk ini. Pemahaman yang kurang dari pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan juga petunjuk teknis (SOP) pesduk membuat pelaksanaan pesduk kurang maksimal dan respon pemerintah tidak dilakukan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Padang Pariaman, beberapa SKPD yang sering melakukan respon diantaranya adalah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SKPD yang lainnya tidak melakukan respon disebabkan kurangnya pemahaman SOP pesduk dan kurang patuh dalam melakukan perintah dari pimpinan yaitu bupati Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kendala-Kendala implementasi *e-government* (pesduk)

Kendala yang terjadi didalam implementasi pesduk yang dianalisis berdasarkan teori Hogwood & Gunn yang mengatakan terdapat 10 kendala implementasi namun dalam pelaksanaan pesduk setelah di analisis hanya terdapat 8 kendala yang terjadi pada implementasi pesduk. Kendala-kendala tersebut dapat disimpulkan diantaranya adalah kondisi eksternal seperti jaringan dan beberapa masyarakat *status quo* atau gagap teknologi, sumberdaya seperti SDM dan peralatan yang belum mencukupi, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan seperti keterlambatan pencairan dana, hubungan antara SKPD namun tidak semua SKPD terhubung dengan pesduk, hubungan saling ketergantungan seperti pesduk bergantung dengan kerjasama seluruh SKPD dalam merespon pertanyaan masyarakat, pemahaman pesduk yang minim pada internal pemerintah atau SKPD, koordinasi dan koordinasi yang belum sempurna antara implementor, dan kepatuhan tidak sepenuhnya terjadi pada implementor dalam menjalankan pesduk.

3. Pengaruh implementasi *e-government* (pesduk) terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Padang Pariaman

Menurut masyarakat pengaruh implementasi *e-government* pesduk terhadap komitmen pemerintah dan pemerintah memerhatikan masukan saran masyarakat cukup baik secara keseluruhan. Pengaruh implementasi pesduk terhadap penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang baik. Pengaruh implementasi pesduk

terhadap tingkat pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan menunjukkan tingkat pencapaian yang kurang baik di Kabupaten Padang Pariaman. Dan pengaruh implementasi pesduk terhadap keberhasilan dalam mencapai hasil akhir (*Output*) kurang baik atau kurang berhasil. Jadi, keseluruhan dari pengaruh implementasi *e-government* pesduk terhadap akuntabilitas publik kurang baik dalam pelaksanaan di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Saran

Dari analisis data hasil temuan dan kesimpulan di atas maka diajukan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat:

1. Kepada seluruh pengelola dan SKPD yang terkait dengan pesduk agar melaksanakan SOP pesduk dengan baik, sehingga dapat membantu dan menyelesaikan masalah masyarakat.
2. Pemahaman pesduk perlu untuk terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di internal pemerintahan dan juga masyarakat, karena pesduk sangat berguna untuk pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan menambah pengetahuan mengenai kondisi yang terjadi di Padang Pariaman dan masyarakat untuk mengatasi masalahnya.
3. Pertemuan pemerintah dalam membahas permasalahan pemerintah terkait pesduk perlu dilakukan lebih intens.
4. SKPD terkait yang menjawab pertanyaan, saran, keluhan atau laporan harus bertindak sesuai dengan jawaban yang diberikan kepada masyarakat dan melakukan tindakan langsung kepada permasalahan masyarakat yang terjadi sehingga tidak sekedar menjawab pesan-pesan masyarakat melalui pesduk saja.